

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis finansial asia yang terjadi pada tahun 1998 telah menimbulkan berbagai kesulitan terutama dalam dunia usaha. Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampak dari krisis tersebut, akibatnya banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan. Sejak saat itu isu mengenai *corporate governance* mulai berkembang, baik pemerintah, investor maupun manajemen perusahaan mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan. Lamanya proses perbaikan di Indonesia, disinyalir karena lemahnya *corporate governance* yang diterapkan pada perusahaan di Indonesia. Sehingga dibentuk pedoman *Good Corporate Governance* yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Corporate governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*. Perusahaan merupakan wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga kenyataannya bahwa suatu struktur *corporate governance* memiliki andil mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi pajaknya,

tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, Link dan Mayer, 2006).

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Coporate Governance*) terdapat 5 prinsip yang di kemukakan yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*indepedency*), dan kewajaran (*fairness*). Ketika lima prinsip ini dapat dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajak. Namun ketika dinamika dalam pengelolaan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip *corporate governance* yang seharusnya dijalankan dan tidak adanya pengawasan, maka memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan meminimalkan beban pajak atau melakukan praktik penghindaran pajak. (Annisa dan Kuniasih, 2012).

Perusahaan menganggap pajak sebagai suatu biaya sehingga perusahaan cenderung melakukan perencanaan pajak untuk mengupayakan penghematan dalam membayar pajak agar jumlah utang pajaknya serendah mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Dalam menjalankan *coporate governance* yang baik pajak merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan sesuai dengan definisi pajak itu sendiri. Penerapan prinsip

corporate governance secara konsisten begitu penting agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Penelitian yang dikeluarkan oleh Sartori (2008) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya sehingga akan meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

Salah satu bentuk implementasi dari konsep *corporate governance* adalah penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Indonesia pemerintah telah mengatur mengenai CSR dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dengan diaturnya dalam undang-undang, maka CSR dianggap sangat penting dan bersifat wajib.

Menurut Susiloadi (2008) terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara perusahaan dan masyarakat sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan (*profit*) dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Hal ini terlihat jelas bahwasanya perusahaan dihadapkan tidak hanya pada perolehan laba semata dalam usahanya melainkan juga memperhatikan

tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Pemahaman perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya tidak selalu sama tingkatannya. Semakin perusahaan peduli akan pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin sadar akan pentingnya pajak yang merupakan kontribusi secara tidak langsung bagi masyarakat secara umum.

Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Sehingga perusahaan mempunyai kewajiban ganda dalam menganggarkan dana untuk kegiatan CSR dan membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Watson, 2014).

Rasio keuangan dapat digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan saat ini ataupun memproyeksikan di masa akan datang. Rasio *Leverage* salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang menimbulkan pos biaya tambahan berupa bunga atau interest yang mengakibatkan pengurangan beban pajak.

Dalam prakteknya banyak wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan pajak secara agresif terbagi dalam beberapa tipe, yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* adalah tindakan

penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan *tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang masih tidak keluar dari lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan atau tidak keluar dari hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang kemudian dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan negara akan menjadi sedikit dari yang seharusnya diterima negara. Para pemangku otoritas pajak tampaknya sudah berusaha untuk menegakkan batasan yang jelas terkait penghindaran pajak, tidak hanya itu para otoritas pajak juga semaksimal mungkin mencegah agar wajib pajak tidak masuk ke dalam celah ambiguitas peraturan perpajakan. (Bovi, 2005).

Berdasarkan beberapa teori menyatakan ada keterkaitan antara *corporate governance*, CSR, dan *leverage* dengan aspek perpajakan yaitu praktik penghindaran pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya juga terlalu sering mengaitkan *corporate governance* dan CSR dengan kinerja seperti studi yang dilakukan oleh Pranata (2007), Raharja (2012), Wati (2012), dan Windah dan Andono (2013). Sedangkan studi yang dilakukan oleh Dewi (2011), Wijayanti, et al. (2011), Kurnianto, et al. (2011), dan Yaparto, et al. (2013) mengaitkan antara CSR dengan kinerja.

Penelitian yang mengkaji hubungan *corporate governance*, CSR, dan *leverage* terhadap aspek perpajakan, seperti studi Annisa dan Kurniasih

(2012), Hidyanti dan Laksito (2013), Richardson dan Lanis (2011), Yoehana (2013), Winata (2014), dan Winarsih, et al. (2014). Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Winarsih, et al. (2014) yaitu “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif Studi pada Perusahaan manufaktur yang Listing di BEI tahun 2009-2012”. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan skor CGPI dalam mengidentifikasi *good corporate governance* serta *leverage* sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen difokuskan pada salah satu bagian dari pajak agresif yaitu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena peneliti ingin memfokuskan pada tindakan penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini mengambil populasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode waktu 2012-2014.

Berdasarkan permasalahan tersebut serta minimnya penelitian terkait dengan *corporate governance*, CSR, *leverage*, dan praktik penghindaran pajak maka penulis mengalami ketertarikan untuk menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN LEVERAGE TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan antara lain :

1. Menguji pengaruh *Corporate Governance* terhadap praktik penghindaran pajak Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menguji pengaruh *Leverage* terhadap praktik penghindaran pajak Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat teoritis

Bagi akademik, dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan sebagai bahan rujukan awal bagi penelitian yang mengembangkan penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi investor

Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tata kelola dan tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan citra perusahaan.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana praktik penghindaran pajak lebih tinggi.

- c. Bagi perusahaan

Menambah informasi perusahaan terkait pentingnya *corporate governance*, CSR, dan *leverage* akan memberikan dampak yang tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, tetapi juga sikap terkait pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran peneliti yang lebih jelas dan sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti yaitu meliputi teori tentang *corporate governance*, *CSR*, *leverage*, dan praktik penghindaran pajak beserta pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian asumsi

klasik, analisis regresi linier berganda, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian terhadap jawaban di tolak atau diterimanya hipotesis yang dibuat sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta memuat saran-saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN